



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 47 - 2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa Program Unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa Program Unggulan tersebut perlu ditetapkan kinerjanya secara lebih rinci yang terdiri dari rumusan definisi operasional, indikator kinerja, satuan, target tahun 2021-2026, sub kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta bertanggungjawab dan mengkoordinir pencapaian target dari masing-masing Program Unggulan tersebut;
- c. bahwa indikator kinerja, satuan dan target dari masing-masing Program Unggulan menjadi dasar penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi capaian terhadap Program Unggulan setiap tahunnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan rincian yang terdiri dari rumusan definisi operasional, indikator kinerja, satuan, target tahun 2021-2026, sub kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta bertanggungjawab dan mengkoordinir pencapaian target dari masing-masing Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kinerja Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pengalokasian anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021-2026 dan dapat dibiayai oleh sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Kinerja Program Unggulan beserta rinciannya sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi capaian terhadap Program Unggulan setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kinerja Program Unggulan dan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan dapat dibiayai oleh sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua TAPD;
2. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesehatan								Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	c. RS. M. Natsir (%)	70	90	100	100	100	100	RS. M. Natsir Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	d. RSUD Pariaman (%)	70	90	100	100	100	100	RSUD Pariaman Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	2. Persentase SDM yang tersedia dalam pengujian Covid							
	a. UPTD Laboratorium Kesehatan (%)	80	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	b. RSAM Bukittinggi (%)	80	90	100	100	100	100	RSAM Bukittinggi Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. RS. M. Natsir (%)	80	90	100	100	100	100	RS. M. Natsir Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	d. RSUD Pariaman (%)	80	90	100	100	100	100	RSUD Pariaman Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	3. Jumlah sarana mobile test baru untuk pengujian test covid sederhana yang disediakan (unit)	1	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
	4. Jumlah puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas) (unit)	279	279	279	279	279	279	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
	5. Persentase puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Catatan: 1. Fungsi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Sarana Pengujian Test COVID19 sederhana di puskesmas merupakan tanggung jawab APBD Kabupaten/Kota
3. Integrasi data pasien yang terinfeksi, yang meninggal dan yang sembuh akibat covid → Sistem Pelaporan Corona	1. Jumlah sistem data informasi terkait covid yang tersedia (Sistem Pelaporan Corona)	-	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
4. Pelacakan kasus Covid merupakan bagian dari pekerjaan Puskesmas (yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota) sehingga peran Provinsi lebih banyak pada koordinasi	2. Persentase sistem data informasi terkait covid yang tersedia (persen)	70%	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan								
1. Pelayanan terhadap pasien Covid 19 gejala ringan dengan komorbid, gejala sedang gejala berat, dan kritis di Rumah Sakit	1. Jumlah Rumah Sakit layanan Covid 19	46	46	46	46	46	46	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 2. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
2. Koordinasi Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kab/kota terkait dengan isolasi mandiri pasien covid tanpa gejala	2. Jumlah Rumah Sakit Rujukan Covid 19	22	22	22	22	22	22	
3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan								
1. Pelayanan penanganan difokuskan pada peningkatan sarana, prasarana serta SDM Kesehatan yang berada pada 4 (empat) Rumah Sakit milik Provinsi yakni RSAM Bukittinggi, RSJ HB Saanin, RS.M. Natsir dan RSUD Pariaman.	1. Persentase sasaran vaksinasi Pertama (%)	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Surveilans (2022) 2. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (2023-2026)
	2. Persentase sasaran vaksinasi Kedua (%)	60	70	85	100	100	100	
	3. Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd	70	80	90	100	100	100	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Percepatan vaksinasi sesuai dengan standar WHO/target nasional 3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	<i>Immunity (%)</i>							
1. Untuk Pencegahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memberdayakan Kader Tanggap Covid melalui kegiatan sosialisasi 3 M kepada masyarakat. 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	1. Jumlah kader tanggap Covid yang terbentuk (orang) 2. Jumlah kegiatan sosialisasi 3 M yang dilaksanakan (kali)	19 60	38 80	57 100	76 120	95 140	114 160	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1. Pelaksanaan Pengendalian Covid dilakukan oleh Satgas Covid baik berupa kebijakan-kebijakan pembatasan social, pelarangan bepergian, penegakan hukuman dll 2. Sosialisasi dan implementasi Perda No 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru 3. Penanggung jawab Progul BPBD	1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada masyarakat (kali) 2. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada satuan pendidikan aman bencana (kali) 3. Jumlah kabupaten/kota yang dapat dilakukan penegakan dan pengawasan Perda No. 6 Tahun 2020	1 1 10	1 4 13	1 4 16	1 4 19	1 4 19	1 4 19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Satuan Polisi Pamong Praja Sub kegiatan : 1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Daerah dan Peraturan Gubernur. 2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
II. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru								
Definisi Operasional								
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak untuk siswa pada sekolah jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan luar Biasa (SLB)	1. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA)							
2. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	a. Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA) 2. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA)
	b. Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	236	236	236	236	236	236	
	c. Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak (unit)	81	94	236	236	236	236	
	d. Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak (unit)	-	118	236	236	236	236	
	2. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
	a. Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMK) 2. Rehabilitasi Sarana, Prasarana
	b. Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	111	111	111	111	111	111	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak (unit)	40	52	111	111	111	111	dan Utilitas Sekolah (SMK)
	d. Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak (unit)	-	55	111	111	111	111	
	3. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB)							
	a. Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	-	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SLB) 2. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SLB)
	b. Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	29	29	29	29	29	29	
	c. Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak (unit)	-	4	29	29	29	29	
	d. Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak (unit)	-	15	29	29	29	29	
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak ditempat-tempat umum	1. Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia							
2. Fasilitasi umum yang dimaksud adalah Kawasan wisata, desa wisata, tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan provinsi (UKPP), terminal milik provinsi dan rest area kewenangan provinsi	a. Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
3. Mekanisme penganggarannya dapat melalui hibah kepada kelompok masyarakat seperti Pokdarwis atau	b. Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	4	50	75	75	75	75	
	c. Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak (unit)	4	50	75	75	75	75	
	d. Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak (unit)	4	50	75	75	75	75	
	2. Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia							

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kelompok lainnya 4. Penanggung jawab Progul Biro Organisasi untuk UKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	a. Jumlah Terminal Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (akumulasi) (unit)	-	1	2	3	4	5	Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	- Terminal Padang Panjang	-	1	1	1	1	1	
	- Terminal Sago Painan	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	-	-	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
	b. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit)	-	-	2	4	5	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Sago Painan	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	1	1	
	c. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit)	-	1	2	3	4	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	1	1	1	1	1	
	- Terminal Painan	-	-	1	1	1	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	
	- Terminal Payakumbuh	-	-	-	-	1	1	
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
	d. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit)	-	-	1	2	3	5	
	- Terminal Padang Panjang	-	-	1	1	1	1	
- Terminal Payakumbuh	-	-	-	1	1	1		
- Terminal Sago Painan	-	-	-	-	1	1		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Terminal Batusangkar	-	-	-	-	-	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	-	-	-	-	1	
	3. Jumlah sanitasi layak di Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (lokasi)							
	a. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (lokasi)	10	12	15	16	18	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Provinsi
	b. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak sesuai dengan CHSE (lokasi)	-	19	19	19	19	19	
	c. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (lokasi)	10	12	15	16	18	19	
	d. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak (lokasi)	-	-	19	19	19	19	
III. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru								
Definisi Operasional : 1. Menuntaskan pembangunan stadion utama Sikabu terlebih dahulu agar dapat	Persentase terbangunnya Main Stadium Sikabu (%)	40,1	40,1	60	75	90	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dijadikan pusat kegiatan olahraga serta pusat pembinaan olahraga prestasi paling lambat tahun 2023/2024 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang								1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
IV. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)								
1. Daerah 3 T adalah daerah yang berada di pelosok, terpencil, terbatas akses transportasi dan layanan dasar 2. Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah ASN dan Non ASN (honoror) dan yang telah bersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi 3. Lingkupnya berada pada SMA/SMK/SLB negeri 4. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan	1. Jumlah Guru/Tenaga Pendidik di Daerah 3 T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang) a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang) b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang) 2. Jumlah Tenaga Kependidikan di Daerah 3T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang) a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang) b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)							
		-	314	314	314	314	314	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		-	83	83	83	83	83	
		-	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		-	1	1	1	1	1	
V. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen								
Definisi operasional : 1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan	1. Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima							

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
untuk pemerataan akses Pendidikan									
Defnisi operasional :									
1. Pembangunan SMA dan RKB SMA diprioritaskan jika: <ul style="list-style-type: none"> a. daya tampung SMA saat ini yang telah ada masih belum mencukupi dengan jumlah penduduk usia SMA di daerah tersebut a. belum adanya SMA pada daerah atau kawasan dengan jumlah penduduk usia SMA yang telah mencukupi untuk sebagai syarat pendirian SMA b. untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah tersedia hibah lahan dengan kepemilikan dari Pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat. 2. Pembangunan USB SMK dan RKB SMK diprioritas sesuai dengan potensi daerah 3. Revitalisasi SMK sesuai dengan potensi daerah 4. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	1. Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) USB yang dibangun setiap tahun (unit)								
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit), dengan target : <ul style="list-style-type: none"> - SMAN 2 Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat - SMAN 12 Solok Selatan - SMAN 17 Padang - SMAN 2 Sungai Geringging - SMAN 1 Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman 	-	-	5	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	<ul style="list-style-type: none"> b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit), dengan target : <ul style="list-style-type: none"> - SMKN 6 Solok Selatan - SMKN 3 Bukittinggi - SMKN 11 Padang - SMKN 1 Palupuah Kabupaten Agam - SMKN Akabiluru 50 Kota 	-	-	5	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	<ul style="list-style-type: none"> c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit) Yakni: <ul style="list-style-type: none"> - SLBN 1 Kepulauan Mentawai - SLBN 1 Padang Pariaman - SLBN 1 Dharmasraya - SLBN 2 50 Kota - SLBN 3 Sawahlunto 	-	-	5	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun (unit)							
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit)	19	32	50	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (SMA)
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit)	5	11	25	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SMK)
	c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit)	-	-	18	-	-	-	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
VII. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri								
Definisi operasional : 1. Focus beasiswa adalah masyarakat dan ASN pemprov 2. Untuk ASN Pemprov melalui tugas belajar 3. Untuk masyarakat bersumber dari PT Rajawali dan sumber lainnya seperti CSR, universitas/ perguruan tinggi, dana rantau dan sumber dana lainnya 4. Untuk sumber dana lainnya seperti CSR dan lainnya maka Peran provinsi memfasilitasi kerjasama dengan universitas dalam negeri dan luar negeri yang akan memberikan	1. Jumlah ASN Provinsi yang mendapatkan tugas belajar baru pada jenjang pendidikan S1/S2/S3 (orang)	6	5	10	10	15	15	Badan Kepegawaian Daerah Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	2. Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 (orang)	401	401	401	401	401	401	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (Sumber Dana dari Beasiswa Rajawali)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>beasiswa bagi lulusan SMA dan SMK dari Sumatera Barat</p> <p>5. Lingkup jenjang Pendidikan yakni S1, S2 dan S3</p> <p>6. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan</p>								
VIII. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan								
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi untuk penelitian dan pengembangan yang berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan dan Program Unggulan yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi dan Swasta (bukan memberikan hibah kepada PTN atau PTS).</p> <p>2. Hasil penelitian berupa produk inovatif terapan</p> <p>3. Tema penelitian dikaitkan dengan program-program unggulan RPJMD dan Prioritas Pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Majelis</p>	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebijakan untuk mendukung program unggulan (dokumen)	5	5	5	5	5	5	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 5. Penelitian aspek-aspek sosial

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pertimbangan Litbang 4. Estimasi pertahun adalah 5 penelitian 5. Penanggung jawab Progul Balitbang								
SUMBAR RELIGIUS DAN BERBUDAYA								
1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi								
Definisi operasional : 1. Menjadikan Gedung LKAAM dan Bundo Kandung menjadi tempat edukasi dan literasi (membuat galeri) 2. Membangun Gedung MUI dan juga membuat galeri 3. Melakukan pengajian dan pembelajaran keagamaan secara rutin di Masjid Raya seperti belajar Al Quran bagi generasi muda, belajar sholat, penyelenggaraan jenazah dll 4. Penyediaan tempat front office untuk pengunjung agar menutup aurat 5. Penanggung jawab Progul yakni Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Biro Kesra	1. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di LKAAM (unit)	-	1	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3. Pengadaan Mebel
	2. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di Bundo Kandung (unit)	-	1	-	-	-	-	
	3. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi LKAAM (orang)	-	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	4. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi Bundo Kandung (orang)	-	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000	
	5. Jumlah rata-rata aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat per minggu		10	25	34	34	34	34

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>(diluar pelaksanaan sholat 5 waktu) yang diselenggarakan (kali)</p> <p>Aktifitas setiap minggu:</p> <p><u>Mulai 2021:</u></p> <p>a. Ceramah Zuhur/Jumat (7 kali)</p> <p>b. Subuh Mubarakah (1 kali)</p> <p>c. Tahsin Qur'an (2 kali)</p> <p><u>Mulai 2022 :</u></p> <p>d. Ceramah Magrib (7 kali)</p> <p>e. Tahfidz Qur'an (2 kali)</p> <p>f. Pelatihan Bahasa Arab (6 kali)</p> <p>g. Penyelenggaraan Jenazah (1 kali 2 bulan)</p> <p>h. Wirid Remaja (2 kali sebulan)</p> <p>i. Majelis Ta'lim (1 kali sebulan)</p> <p>j. Ceramah Subuh (6 kali)</p> <p>k. Pembelajaran Adat (1 kali)</p> <p><u>Mulai 2023 :</u></p> <p>l. Pelatihan Sholat Kusyuk (2 kali)</p>							
	6. Jumlah jenis aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat yang diselenggarakan (jenis)	3	10	12	12	12	12	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</p>

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan								
Definisi operasional : 1. Memberikan hibah kepada Lembaga keagamaan seperti TPA, TPQ, MDA, pondok alquran, LPTQ dan Lembaga keagamaan lainnya serta hari besar keagamaan lainnya 2. Penanggung jawab Progul Biro Kesra	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan hibah (rumah ibadah) Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan hibah (lembaga)	710 -	174 35	174 35	174 35	174 35	174 35	Biro Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
III. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (<i>education tourism</i>)								
Definisi operasional : 1. Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan agar dapat segera difungsikan sebagai pusat Pendidikan dan wisata budaya paling lambat tahun 2023 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase terbangunnya Gedung Kebudayaan (%)	33	36	70	100	-	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2. Membangun kembali Museum Adityawarman atau melakukan rehabilitasi berat terhadap Gedung yang telah ada 3. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebudayaan	Persentase terbangunnya/rehabilitasi berat terhadap Museum Adityawarman (%)	-	-	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>2. Membangun ruang IPTEKS tersendiri dengan lokasi masih di Lingkungan Museum Adityawarman (saat ini bergabung dengan ruangan Museum)</p> <p>3. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang</p>	Persentase terbangunnya Gedung IPTEKS (%)	-	-	50	100	100	100	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
<p>1. Menjadikan Kawasan Museum dan Gedung Kebudayaan sebagai pusat aktifitas masyarakat terutama aktifitas seni dan budaya serta IPTEKS serta tersedia ruang ramah bermain anak di museum</p> <p>2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan</p>	1. Jumlah ruang ramah bermain anak di Museum Adityawarman yang terbangun (lokasi)	-	-	1	-	-	-	<p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
	2. Jumlah aktifitas seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Kebudayaan dan Museum Adityawarman (kali)	10	20	25	30	35	35	<p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Fungsional Peningkatan Layanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
<p>1. Meningkatkan kapasitas Perpustakaan Daerah agar dapat menjadi pusat Pendidikan dan literasi masyarakat serta ramah anak</p> <p>2. Penanggung jawab Progul Dinas</p>	<p>1. Jumlah ruang ramah bermain anak yang tersedia Perpustakaan Daerah (lokasi)</p> <p>Telah tersedia sejak tahun 2016</p>	1	-	-	-	-	-	<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kearsipan dan Perpustakaan	dan upaya yang dilakukan dari 2021 sampai dengan 2026 adalah peningkatan mutu ruang ramah bermain anak seperti ketersediaan perlengkapan dan lain-lain							
	2. Jumlah aktifitas/kegiatan literasi di Perpustakaan Daerah yang melibatkan masyarakat umum yang diselenggarakan (kali)	6	7	8	9	10	11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
	3. Jumlah layanan perpustakaan visual yang tersedia (studio)	-	-	1	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
	4. Jumlah ruang baca terbuka yang tersedia di perpustakaan daerah (ruang)	-	-	1	-	-	-	
IV. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan								
Definisi operasional : 1. Pembinaan kepada seniman dan budayawan termasuk kepada sejarawan seperti pelatihan atau bimtek, dan juga memberikan penghargaan secara rutin kepada para maestro seni dan budayawan serta sejarawan Sumatera Barat	1. Jumlah seniman yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	190	200	500	500	500	500	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan 2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan	2. Jumlah budayawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	150	150	250	250	250	250	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Perlindungan Pengembangan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat
	3. Jumlah sejarawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	4. Jumlah seniman/budayawan/sejarawan yang menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (orang)	8	7	10	10	10	10	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Kontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan
SUMBAR SEJAHTERA								
1. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian								
1. Pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari total APBD. 2. Distribusi anggaran untuk Dinas perkebunan Tanaman pangan dan hortikultura, dinas pangan, dinas	1. Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kelautan dan perikanan, dinas Kehutanan, serta dinas SDA dan Bina Kontruksi untuk irigasi	Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD (%)							
3. Pengalokasian anggaran termasuk gaji, DAK, dana hibah, dan dana transfer lainnya								
3. Focus kegiatan pada:								
a. menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)	2. Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)							
b. meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura							
c. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan	- Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan (batang)	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
d. peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam	- Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan (batang)	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	- Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan (batang)	473.000	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000	
	- Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan (batang)	23.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
e. meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan	- Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan (batang)	2.100	200.000	400.000	400.000	100.000	100.000	
	- Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan (batang)	-	37.500	231.250	231.250	100.000	100.000	
	- Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan (ton)	5,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
f. diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi	- Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan (ton)	6,18	120	120	120	120	120	
	- Jumlah benih/bibit Cabe	3.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Benih kerapu (ekor)	10.600	23.250	25.000	30.000	30.000	30.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
	- Bibit rumput laut (kg)	-	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	
	- Benih nila (ekor)	-	120.000	250.000	300.000	320.000	370.000	
	- Benih vaname (ekor)	-	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
	- Calon induk ikan nila (kg)	-	-	8.800	9.200	9.600	10.000	
	- Induk ikan gurami (kg)	-	-	500	550	600	650	
	- Induk ikan lele (kg)	-	-	500	500	600	650	
	- Induk ikan mas (kg)	-	-	500	550	600	650	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. Urusan Kehutanan							
	- Jumlah Bibit (batang)	400.000	400.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 2. Sertifikasi Sumber Benih 3. Sertifikasi Mutu Benih 4. Sertifikasi Mutu Bibit 5. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 6. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 7. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
	- Jumlah Arboretum (unit)	-	1	2	2	2	3	
	- Luas Agroforestry (Ha)	500	500	500	500	500	500	
	- Jumlah Komoditi yang dikembangkan (jenis)	10	10	10	10	10	10	
	d. Urusan Pangan							
	- Jumlah benih/bibit bermutu yang disediakan (batang)	-	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	Dinas Pangan Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
	e. Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan							
	- Semen beku (dosis)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	- Sapi (ekor)	900	900	960	1.020	1.080	1.140	
	- Service Per Conception (S/C)	2,6	2,4	2,4	2,2	2,0	1,9	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	3. Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan yang dilakukan (kali)							
	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura							
	- Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya pertanian (sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura) (kali)	5	7	7	7	7	7	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan							
	- Jumlah pos pengawas yang dibangun baru (unit)	1	-	1	2	2	3	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pengawasan Usaha Perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil 2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
	- Jumlah Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas yang diadakan (Paket)	3	6	6	6	6	3	
	- Jumlah hari	100	120	140	140	160	160	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 1 tahun yang dilakukan (hari)							
	c. Urusan Kehutanan							
	- Jumlah kasus tertangani (kasus)	2	2	2	2	2	2	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
	- Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	
	- Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	
	4. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kehutanan yang disediakan (unit)							
	a. Jumlah Alat Produktif yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	b. Jumlah sarana dan prasarana Ekowisata yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	
	c. Jumlah Stup lebah madu yang disediakan (unit)	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5. Jumlah UPTD yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan (UPTD)	5	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pembangunan dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
	6. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan yang disediakan (unit)							
	a. Jumlah Mesin tempel 15 PK yang diadakan (unit)	255	300	305	310	310	310	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	b. Jumlah Mesin tempel 40 PK yang diadakan (unit)	43	50	52	54	54	54	
	c. Jumlah Mesin tempel 8 PK yang diadakan (unit)	6	-	10	15	15	15	
	d. Jumlah Mesin tempel 4 PK yang diadakan (unit)	10	9	-	-	-	-	
	e. Jumlah Fish Box 100 Ltr yang diadakan (unit)	841	1.030	800	800	800	800	
	f. Jumlah Fish Box 220 Ltr yang diadakan (unit)	170	-	150	150	150	150	
	g. Jumlah Fish Box 1.000 Ltr yang diadakan (unit)	22	-	-	-	-	-	
	h. Jumlah Mesin diesel kapal perikanan yang diadakan (unit)	45	-	20	20	20	20	
	i. Jumlah Mesin longtail yang diadakan (unit)	29	30	35	40	45	50	
	j. Jumlah Rumpon yang diadakan (unit)	-	40	75	100	150	200	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	k. Jumlah Gillnet (Laut) yang diadakan (unit)	98	136	150	150	150	150	
	l. Jumlah Tramel Net yang diadakan (unit)	16	100	150	150	150	150	
	m. Jumlah Jaring langli yang diadakan (unit)	16	-	-	-	-	-	
	n. Jumlah Gillnet (Perairan Umum) yang diadakan (unit)	58	230	250	200	200	200	
	o. Jumlah Mesin longtail 8,5 PK yang diadakan (unit)	44	50	30	30	30	30	
	p. Jumlah Mesin tempel 2,5 PK yang diadakan (unit)	14	140	30	30	30	30	
	q. Jumlah mesin Perahu fiber yang diadakan (Unit)	-	90	20	20	20	20	
	7. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan (unit)							
	a. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao							Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	- Gunting Pangkas (set)	-	200	200	200	200	200	
	- Peralatan Jemur (buah)	-	200	200	200	200	200	
	- Kotak Fermentasi (unit)	-	400	400	400	400	400	
	b. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao							
	- Gunting Pangkas (set)	-	300	300	300	300	300	
	- Peralatan Jemur (buah)	-	300	300	300	300	300	
	c. Pengadaan alat dan mesin	-	2	4	8	12	16	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pertanian pra, panen dan pasca panen Gambir (Alat kempa Gambir, Alat peniris, Gerobak, dll)							
	d. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Padi							
	- Elektrik Sprayer (set)	851	100	100	100	100	100	
	- Power Tresher (set)	99	540	-	-	20	25	
	- Hand Traktor (TR 2) (set)	698	20	20	20	20	20	
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik)	0	2	2	2	2	2	
	e. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jagung							
	- Combine (unit)	8	50	50	50	50	50	
	- Cultivator (unit)	188	50	50	50	50	50	
	- Corn Seller	109	10	10	10	10	10	
	f. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Cabe							
	- Cultivator (unit)	20	20	20	20	20	20	
	- Handsprayer Manual (unit)	-	100	100	100	100	100	
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) (paket)	-	5	5	5	5	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bendor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	-	5	5	5	5	5	
	g. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Bawang Merah							

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Cultivator (unit)	10	10	10	10	10	10	
	- Handsprayer Manual (unit)	-	100	100	100	100	100	
	- APPO (alat Pencacah Pupuk Organik) (unit)	-	10	10	10	10	10	
	- Sarana Pasca Panen berupa bendor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	-	5	5	5	5	5	
	h. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Manggis							
	- Sarana Pasca Panen berupa bendor, keranjang panen, terpal dll)	3	3	3	3	3	3	
	i. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jeruk							
	- Handsprayer Manual (unit)	-	5	5	5	5	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bendor, keranjang panen, terpal dll) (unit)	-	300	300	300	300	300	
	8. Penyaluran Sarana Produksi terdiri dari :							
	a. Saprodi Cabe (Ha)	23	110	110	110	110	110	
	b. Saprodi Bawang Merah (Ha)	28	100	100	100	100	100	
	c. Saprodi Maggis (Ha)	369	200	200	200	200	200	
	d. Saprodi Jeruk (Ha)	43	100	100	100	100	100	
	9. Pengadaan sarana pengolahan perkebunan tdd :							
	a. Sarana pengolahan Kakao (unit)	-	4	4	4	4	4	
	b. Sarana pengolahan Kopi	5	1	-	-	-	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(unit)							
	c. Uji organoleptik (Cita Rasa) Mutu Kopi (unit)	-	4	4	4	4	4	
	10. Jumlah Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan (unit)	-	4	4	4	4	4	
	11. Jumlah Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran Bawang yang diadakan (unit)	-	5	5	5	5	5	
	12. Jumlah Sarana pengolahan dan pemasaran Jeruk yang diadakan (unit)	-	100	100	100	100	100	
	13. Jumlah Kab/Kota yang menjadi lokasi Pembinaan, pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian (Kab/Kota)	19	19	19	19	19	19	
	14. Jumlah Pupuk Jagung yang dapat disalurkan (ton)	188,9	300	300	300	300	300	
	15. Jumlah Saprodi Hortikultura yang disalurkan (Ha)	463	510	510	510	510	510	
	16. Luas Jaringan Irigasi tersier yang di rehabilitasi (Ha)	250	100	100	100	100	100	
	17. Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan (Ha)	117	250	450	650	850	1.100	
	18. Jumlah kampung yang melakukan pengembangan Kampung Buah/ Sayur/ Biofarmaka (kampung)	24	35	35	35	35	35	
	20. Jumlah resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen							

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam yang dapat diantisipasi (resiko)							
	a. Jembrana (kasus)	120	115	110	105	100	95	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 2. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	b. Rabies (kasus)	120	115	110	105	100	95	
	c. AI (kasus)	200	195	185	175	165	155	
	d. Jumlah Sampel yang diuji (sampel)	1.488	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	e. Jumlah Bank Pakan yang tersedia (unit)	-	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
	f. Sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura (%)	99	99	99	99	99	99	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	21. Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil (%)							
	a. sub urusan Peternakan (%)	15,25	32,20	49,15	66,10	83,05	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan	10	10	10	10	10	10	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
	c. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	5	5	5	5	5	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani 2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
	d. Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	22. Jumlah Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile (unit/PPK/RMU)	-	-	300	300	300	300	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	23. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi peternakan (%)	25	30	35	40	45	50	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24. Jumlah unit pengolahan ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	5	6	7	8	9	10	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
	25. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan (%)	-	20	20	20	20	20	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 4. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 5. Pembudidayaan Hasil Hutan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 6. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
	26. Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (kelompok)	112	112	112	112	112	112	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	27. Jumlah pemberdayaan Kelompok Wanita dalam pemanfaatan pekarangan pangan berupa bibit tanaman rempah (Kelompok)	52	52	52	52	52	52	
	28. Jumlah TTIC yang beroperasi dengan baik (unit)	1	1	4	4	4	4	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
II. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak								
Definisi operasional : 1. Mempertahankan Sumatera Barat sebagai lumbung padi di nasional dan menaikkan hasil produksi padi setiap tahunnya (ukurannya Gabah kering panen) 2. Meningkatkan produksi jagung setiap tahunnya 3. Meningkatkan produksi komoditas ternak	1. Jumlah produksi padi (ton)	1.346.063	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 2. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian:

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>unggas dan kambing</p> <p>4. Mandiri maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan Sumatera Barat oleh produksi dari Sumatera Barat sendiri</p> <p>5. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	2. Jumlah produksi jagung (ton)	921.514	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044	<p>Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 2. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	3. Jumlah produksi komoditas ternak unggas (ekor)	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	4. Jumlah produksi kambing (ekor)	1.360	1.400	5.000	7.000	9.000	10.000	<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
III. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian								
<p>Definisi operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kinerja BUMD yang ada 2. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMD yang ada 	1. Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (unit usaha)	-	1	-	-	-	-	<p>Biro Perekonomian</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b. Sudah memulai usaha 5. Bekerjasama dengan akselarator 6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM								Produktivitas Tenaga Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja
	c. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	500	1500	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	d. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	300	300	300	300	300	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	113	500	500	500	500	500	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	1040	1850	2.220	2.664	3.197	3.836	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	h. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	-	1.136	1.355	1.500	1.700	1.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	i. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	412	412	412	412	412	Dinas Sosial Sub kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar) 2. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra) 3. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	j. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	200	200	240	280	320	360	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	k. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	150	350	400	450	500	550	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	l. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	765	675	700	725	750	775	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	-	200	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	266	112	112	112	112	112	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (orang)	720	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. Lembaga Kerja Sama antar Desa 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
V. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula								
Definisi operasional :								Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan :
1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan	1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	120	540	540	540	540	540	1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	100	200	200	200	200	200	
3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan	3. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	300	400	400	400	400	400	
4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	50	100	150	150	150	200	
5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM	5. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	4	4	4	4	4	
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan	5	5	5	5	5	5	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)							
VI. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital								
Definisi operasional : 1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama 2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM	1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	60	130	150	180	230	230	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDUMKM 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	-	500	500	500	500	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
VII. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan								
Definisi operasional : 1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	19	19	19	19	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>dan Biro Kerjasama , Pembangunan Dan Rantau.</p> <p>4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD</p> <p>5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian</p>	<p>2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)</p>	-	-	-	1	1	1	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p>
	<p>3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)</p>	-	-	1 unit	-	-	-	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p>
VIII. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional								
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Pusat pertunjukan seni yang direncanakan adalah:</p> <p>a. Gedung Kebudayaan (lokasi di Padang),</p> <p>b. Amphiteatre (lokasi di panorama view ngarai sianok Bukittinggi)</p>	<p>1. Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphiteatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi)</p> <p>Lokasi Amphiteatre :</p> <p>a. Gedung Kebudayaan</p> <p>b. Panorama view ngarai sianok</p>	-	-	3	-	-	-	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah</p>

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>c. Amphiteatre (lokasi di Kawasan talang dengan view 3 danau)</p> <p>2. Peran provinsi yakni membangun amphiteatre (pastikan terkait kepemilikan asset) serta berkoordinasi untuk mengisi aktivitas seni dan budaya dengan sanggar-sanggar seni yang berada di kabupaten/kota tersebut</p> <p>3. Penanggungjawab progul Dinas Kebudayaan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang</p>	<p>Bukittinggi</p> <p>c. Kawasan talang dengan view 3 danau</p>							<p>Provinsi</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya melaksanakan pengawasan terkait dengan pembangunan Amphiteatre oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dana BKK dari APBD provinsi Amphiteatre di Bukittinggi dan di Kab Solok di bangun melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus, dengan sub kegiatan yang berada pada unsur penunjang Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni : <ol style="list-style-type: none"> Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	<p>2. Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphiteatre (kali)</p>	-	3	3	9	9	9	<p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMBAR BERKEADILAN								
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan								
Definisi operasional :								
1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi provinsi 2. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan 3. Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan untuk mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan 4. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	1. Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter)	7.500	6.600	9.125	9.475	8.825	8.550	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sub kegiatan : 1. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
	2. Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)	8,406	3,090	71,15	70,35	54,70	43,40	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Pembangunan Jalan
	3. Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (ruas)	6	7	21	20	17	20	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Pembangunan Jalan
	4. Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)							
	a. Pelabuhan Penyeberangan : - Pelabuhan Bungus di Padang - Pelabuhan Tua Pejat di	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<ul style="list-style-type: none"> Mentawai - Pelabuhan Sikakap di Mentawai - Pelabuhan Siberut di Mentawai 							<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelabuhan Laut : - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Muaro Padang di Padang - Pelabuhan Siberut/Simalepet di Mentawai - Pelabuhan Sioban di Mentawai 	4	4	4	4	4	4	<p>Catatan : Mengoperasionalkan Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi namun hingga Januari 2022 belum ada penyerahan dari Pusat ke Provinsi</p>
II. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang								
<p>Definisi operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi terutama pada daerah belum berkembang, terisolir dan perbatasan 2. Peningkatan konektivitas melalui integrasi antar moda (moda darat, laut dan udara) 3. Operasional terminal type B 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan pelabuhan 5. Penanggung jawab progul Dinas Bina 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (kilometer) 2. Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (ruas) 	16,68	21,60	53,50	49,85	26,60	14,97	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Jalan 3. Rekonstruksi Jalan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	3. Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah):							
	a. Jumlah dokumen RIJLLAJ Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan (Peraturan Gubernur)	-	1	-	-	-	-	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
	b. Persentase Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi (%)	-	-	100	100	100	-	
	c. Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Peraturan Gubernur)	-	-	-	1	-	-	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
	d. Persentase realisasi Perkada Rencana Induk Perkeretaapian (%)	-	-	-	-	100	-	
	4. Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan termanfaatkan dengan baik (unit) yakni : a. Terminal Padang Panjang b. Terminal Payakumbuh c. Terminal Sago Painan d. Terminal Sawahlunto e. Terminal Batusangkar	5	5	5	5	5	5	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 2. Pembangunan Gedung Terminal 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
	5. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)	1	2	2	2	2	2	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
a. Jumlah Dokumen DLKR/DLKT Pelabuhan Laut Tua Pejabat yang tersusun	1	-	-	-	-	-		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(dokumen)							
	b. Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	1	-	-	-	-	
	c. Jumlah Dokumen P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumen P3D)	-	1	-	-	-	-	
	d. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	1	-	-	-	
	e. Jumlah Dokumen DED Simalepet yang tersusun / Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	1	-	-	-	
	f. Jumlah Dokumen DED Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1	-	-	
	g. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1			
	h. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Penyebrangan Sinanak yag tersusun (dokumen)	-	-	-	-	1	-	
	i. Jumlah dokumen DED	-	-	-	-	1	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)							
	j. Jumlah Dokumen DLKR/DLKP Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	
	k. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	
III. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas								
Definisi operasional :								
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1. Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (kelompok)	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana	2. Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (nagari/desa)	2	10	10	10	10	10	
3. Penanggung jawab progul BPBD								
IV. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy) dan Tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (limbah Medis)								
Definisi operasional :								
1. Lokus progul untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok	1. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Keterangan : 1. Sampah yang diolah pada TPA regional Payakumbuh/Solok
2. Pengolahan sampah sebagai sumber	2. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
energi diarahkan kepada <i>waste to carbon</i> yang menjadi biogas 3. Biokonversi BSF untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok untuk mensupport sentra peternakan dan pertanian, sebagai bahan baku industry pakan dan pupuk organic 4. Implementasi pemanfaatan Maggot untuk reduksi sampah, pengembangan direncanakan untuk skala nagari 5. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup								hanya 250 ton per hari (TPA Regional Payakumbuh) dan 60 ton/hari (TPA Regional Solok), sehingga dinilai belum layak untuk diolah menjadi RDF/energi. 2. Sesuai Perpres 38/2018 Hanya ada 12 kota yang diizinkan membuat pengolahan sampah menjadi energi yang akan dibiayai oleh APBN, tidak termasuk Payakumbuh atau Solok. 3. Pengembangan <i>waste to energy</i> disepakati di TPA Kota Padang di Aia Dingin, bukan di TPA Regional Payakumbuh atau TPA Regional Solok, sesuai surat Gubernur ke Menko Maritim dan Investasi No. 660/642.A/PSLB3PK/DLH-2021 tanggal 30 juli 2021 perihal Dukungan Terhadap Rencana Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF) di Kota Padang
	3. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)							Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan :
	a. Jumlah dokumen Kajian	-	1	-	-	-	-	1. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peni

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)							ngkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	-	1	-	-	-	
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	-	-	-	100	-	-	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)	-	-	-	-	30	40	
	2. Persentase Bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok yang terlaksana (%)							Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
	a. Jumlah dokumen Kajian Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)	-	-	1	-	-	-	
	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1	-	-	
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	-	-	-	-	100	-	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	40	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup								
V. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government)								
Definisi operasional : 1. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk juga dalam manajemen internal UKPP. 2. Digitalisasi yang dimaksud adalah seluruh layanan maupun manajemen internal UKPP telah berbasis TIK. 3. Penanggungjawab progul adalah Biro Organisasi, sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai <i>supporting</i> teknis.	Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Unit)	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi : Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : Sub kegiatan : 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI